

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adding, Henk, 2010, Sourcebook Human Rights and Good Governance, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights
- A. Dahl, Robert, 2001, Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta
- Alfisyahrin, 2017, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Yayasan Obor, Jakarta
- Baleg DPR, 2015, Mekanisme Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Penerbit Kencana, Jakarta
- Evanty, Nukila, 2014, Paham Peraturan Daerah, Rajagrafindo Persada, Depok
- Frederickson, H George dan Smith, B. Kevin 2003, The Public Administration Theory Primer, Oxford, USA
- Hardiman, Budi F, 2009, Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta
- Khaleed, Badriyah, 2014, Legislative Drafting, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- M.D, Moh Mahfud, 2013, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Nalle, Victor Immanuel, 2017 Ilmu Perundang-undangan, Suluh Media, Yogyakarta
- Nugroho, Riant, 2018 Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Prasojo, Eko, 2013, Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen, DPRRI_UNDP, Jakarta

R.B. Gibson, 1981, *The Value of Participation*, dalam P.S. Elder (edit.), *Environmental Management and Public Participation*, Canadian Environmental Law Research Foundation of the Canadian Environmental Law Association, Ottawa, USA

Santosa, Mas Ahmad, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta

Satispi, Evi dan Kurniasih, 2019, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, UMJ Press, Tangsel

Suryadi, 2012, *Administrasi Publik dan Otonomi Daerah*, Prisma Press, Bandung

Surbakti, Ramlan 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta, FH UII Press, Hetifah Sj Sumarto, 2009, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor, Jakarta

Widodo, 2015, *Fungsi Legislasi*, DPR-UNDP, Jakarta

Wattimena, Rexa AA, 2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta

Yuliandri, 2007, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*, Disertasi, PPS Universitas Airlangga, Suarabaya

State of the art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik State of the art: Participation concept in public administration, oleh : Antun Mardiyanta.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika), oleh : Siti Hidayati. (*Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, Maret (2019) P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034*)

Fahmi Ramadhan Firdaus. *Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol (17) No. 3 - September 2020, hal. 282-293

Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(6), 618-626

Jurnal :

Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha Yosephine Tita, *Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. I No. 3 Mei 2021

Ade Putra, *Pelaksanaan Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat*, E-Journal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan, [Vol 3, No 4 \(2015\)](#) > - [A11110209](#)

Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz, Victor Juzuf Sedubun, *Jurnal ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 3, Mei 2021 : h. 248-256*. E-ISSN: 2775-619 X

Ikhwanudin, Retnowati WD Tuti, *Implementation of Public Participation in The Establishment of Rules of Laws and Regulations in Legislature The House of Representatives of The Republic of Indonesia During The Covid 19 Pandemi*, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jhss/article/view/4066>. JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) Volume 05, Number 02, July 2021, Page 190 - 197 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jhss> e-ISSN: 2598-120X; p-ISSN: 2598-117X

Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, Maret (2019) P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034

Sema Ardianto, *Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah*, .Jurnal hukum Khaira Ummah, [Vol 13, No 1 \(2018\)](#) ISSN 1907-3319

Peraturan Perundang-undangan :

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 13 Tahun 2022, Revisi Kedua Undang-Undang UU No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib DPR RI

Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Peraturan DPRRI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penusunan Prolegnas

Pasal 1 angka 9 UU 15/2019 dan Pasal 17 UU 12/2011

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas (“Peraturan DPR 2/2019”)

Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan DPR 2/2019

Pasal 39 ayat (1) dan (5) Peraturan DPR 2/2019

Pasal 39 ayat (6) Peraturan DPR 2/2019

Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) UU 12/2011

Pasal 174 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“Perpres 87/2014”)

Pasal 45 ayat (1) dan (3) Perpres 87/2014

Pasal 45 ayat (4) Perpres 87/2014

Pasal 88 dan penjelasannya UU 12/2011

Pasal 142 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (“Peraturan DPR 1/2020”)

Pasal 243 Peraturan DPR 1/2020

Pasal 245 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020

Pasal 246 Peraturan DPR 1/2020

Pasal 69 ayat (1) UU 12/2011

Pasal 72 UU 12/2011

Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU 12/2011

Pasal 81, Pasal 82 UU 12/2011 dan Pasal 85 UU 15/2019

Link/Website :

<https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-legislasi/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b>